

**MIDA**  
**Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi**

P-ISSN 1411-4461  
E-ISSN 2830-7267

Volume 20 | Nomor 2 | September 2023

---

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

<sup>1</sup> Alif Faruqi Febri Yanto  
<sup>1</sup>Universitas Negeri Malang  
<sup>1</sup>aliffaruqi658@gmail.com

---

**ABSTRACT**

---

This research aims to determine the influence of the Regional Financial Accounting System and Internal Control System on the Quality of Regional Government Financial Reports. This research uses a purposive sampling technique, the sample from this research was obtained from 47 financial employees of the Pasuruan district government. The analytical method for this research uses multiple linear regression analysis using the analysis tool, namely SPSS version 25. The results of the research show that the Regional Financial Accounting System variable influences the Positive Quality of Regional Government Financial Reports, Internal Control System has a positive effect on the Quality of Regional Government Financial Reports.

---

**Keywords;** Financial Accounting System, Internal control system, quality of financial reports

---

**A. PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintahan (baik pusat maupun daerah) sebagai bentuk organisasi publik. Situasi ini meningkatkan kebutuhan akan akuntabilitas organisasi pemerintah. Salah satunya adalah tanggung jawab keuangan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan laporan keuangan yang disiapkan secara berkala kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan merupakan laporan keuangan penting yang dihasilkan dari transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media yang digunakan perusahaan untuk menjelaskan kegiatannya kepada publik. Selain itu,

berfungsi untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, agar informasi keuangan dapat bermanfaat bagi penggunaannya, maka informasi yang diberikan harus mempunyai nilai. Laporan yang berguna dan berharga bagi penggunaannya menunjukkan pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Dalam hal ini, laporan keuangan harus memenuhi prinsip ketepatan waktu, dan penyusunannya sesuai standar akuntansi negara (SAP) merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut UU 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan yang disampaikan dinyatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan pemahaman.

LKPD menggambarkan kondisi dan kemampuan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, LKPD harus berkualitas sehingga mampu menggambarkan keadaan dan kinerja secara akurat. Berdasarkan informasi yang tersaji, terlihat bahwa LKPD yang berkualitas memenuhi syarat properti kualitatif. Apabila LKPD memenuhi persyaratan tersebut, maka hasil LKPD dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dalam mengukur karakteristik kualitatif LKPD, Otoritas Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan audit laporan keuangan. BPK merupakan lembaga yang berwenang. Terkait LKPD, ada empat tingkatan BPK dalam menyampaikan pendapat atas laporan keuangan. Pertama, adil tanpa pengecualian (WTP), kedua rasional dengan pengecualian (WDP), ketiga irasional (TW), dan terakhir tidak berpendapat (TMP).

Berdasarkan pendapat di atas tentang BPK sebagai alat ukur kualitas LKPD, maka WTP merupakan penilaian terbaik terhadap kualitas laporan keuangan dalam pemeriksaan LKPD. Hal ini mengarahkan peneliti ke Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Terdapat beberapa perubahan laporan audit dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Namun dalam laporan pemeriksaan laporan keuangan tahunan Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2022, BPK masih menemukan beberapa permasalahan, antara lain pemeriksaan sistem pengendalian intern Kabupaten Pasuruan yaitu pengelolaan dan pengelolaan keuangan. Pertanggungjawaban kepada banyak akuntan, pengeluaran

organisasi lokal tidak sesuai, nilai investasi non-permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir tidak sah dan tidak dapat dianggap sesuai, namun pemerintah kabupaten menerimanya.

Berdasarkan IHPS Semester 1 BPK 2022, permasalahan umum yang dihadapi LKPD di Indonesia ditemukan dari 541 LKPD termasuk 5.175 kelemahan SPI. Dari jumlah tersebut, 1.729 terkait dengan akuntansi dan pelaporan dan 2.338 terkait dengan belanja pemerintah. Pendapatan, 1.108, berkaitan dengan struktur pengendalian internal ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Selain itu, ada fenomena yang juga terlihat di Jawa Timur. Permasalahan yang sering terjadi pada laporan keuangan sektor OPD di Jawa Timur adalah permasalahan sistem pengendalian intern terkait dengan aset yang tidak tersedia meskipun memiliki laporan WTP. Hal ini terjadi secara konsisten setiap tahunnya. Opini WTP diartikan sebagai laporan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku, bebas dari kesalahan material, dan disajikan secara wajar. Namun meski sudah mendapat laporan audit WTP, situasi saat ini permasalahan selalu muncul setiap tahunnya.

Menyiapkan laporan keuangan berkualitas tinggi yang mencerminkan opini auditor tidaklah mudah. Memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari tim pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dapat memakan waktu dan biaya. Namun keadaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan memerlukan upaya dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan serta aspek yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Demikian penjelasan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Triono & Dewi, 2020).

Pentingnya pengendalian internal yang memadai dan komitmen organisasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal berperan dalam mengendalikan dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, memastikan laporan keuangan dilaporkan dan disusun secara akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal dinilai mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian Indrayani & Widyaastuti (2020) dan Triono & Dewi (2020), sedangkan penelitian oleh Desipradani & Nuraini (2018), Katharina et al (2019) ditemukan tidak

adanya pengaruh hubungan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) juga berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran dan pelaporan, baik secara sistematis maupun manual, keuangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 2007.59). Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Jika sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan baik maka kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat. Sebab, pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang jika tidak diterapkan akan sulit memenuhi karakteristik kualitatif pelaporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian Dzulfikar Ahli Fikri (2019) dan Yusrawati (2015), (Surya Adhitama, 2017) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kartopawiro dan Susanto (2018) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".

### **Teori Keagenan**

Tanggung jawab publik adalah tugas dari prinsipal (agent) untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, untuk itu ia bertanggung jawab kepada prinsipal (yang diperintahkan), yang berhak menuntut tanggung jawab (Mardiasmo, 2004), dalam (Launtu, 2021). Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah pemerintah berperan sebagai agen (manajer pemerintahan) yang harus menentukan strategi tertentu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai prinsipal. Prinsipal pasti menginginkan kinerja yang baik dari

agen dan salah satunya terlihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan laporan keuangan dan pelayanan yang baik bergantung pada strategi yang diterapkan oleh dewan. Jika kinerja pemerintah baik maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan pemilihan strategi sebagai prinsip mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai agen. Menurut teori keagenan, pemerintah memiliki akses langsung terhadap informasi dibandingkan dengan masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Hal ini terkadang dapat memicu tindakan korupsi agen. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk mengurangi asimetri informasi (Suhardjo, 2019).

### **Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan, variabel penerapan sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai sistem informasi akuntansi untuk mengolah data transaksi di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, antara lain SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dan SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan). Sistem informasi ini dibuat dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya pengembangan administrasi elektronik (E-Government) serta untuk memudahkan dan mempercepat proses administrasi publik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kualitas informasi menunjukkan seberapa baik permintaan akan informasi terpenuhi. (Pareek, 2006) Informasi akuntansi yang berkualitas adalah informasi akuntansi yang mempunyai karakteristik yang menjadikan informasi tersebut lebih bermanfaat. (O'Brien dan Marakas, 2011) Penerapan SIA meningkatkan dan menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Fikri (2019) dan Yusrawati (2015), (Surya Adhitama : 2017), hipotesis pada penelitian tersebut menghasilkan pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, didapatkan pada hasil riset yang dilakukan oleh Kartopawiro dan Susanto

(2018), sehingga hasil dari kedua penelitian tersebut tidak memperoleh hasil yang sama. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis berikut:

H1: Penerapan SAKD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu proses tetap atas tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus oleh manajer dan pegawai untuk menciptakan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Sistem pengendalian intern negara yang selanjutnya disingkat SPIP adalah pengendalian intern yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Indrayani & Widyaastuti (2020) dan Triono & Dewi (2020), sedangkan penelitian oleh Desipradani & Nuraini (2018), Katharina et al (2019) ditemukan tidak adanya pengaruh hubungan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga hasil dari kedua penelitian tersebut tidak memperoleh hasil yang sama. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis berikut:

H2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **B. METODE**

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian keuangan/akuntansi di kantor lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah dan Kantor Komunikasi dan Informasi., dalam penerapannya menggunakan purposive sampling. kriteria responden dalam riset ini adalah: (1) Pejabat yang menyelenggarakan fungsi akuntansi atau keuangan administrasi, (2) Memiliki pengalaman satu tahun dalam penyusunan pelaporan akuntansi. Kriteria ini dianggap cukup mewakili populasi untuk menjawab pertanyaan

penelitian. Penelitian ini menggunakan skala Likert 1 – 5. Penelitian ini dilakukan menggunakan software Smart PLS 3.0. Metode analisis data yang diterapkan pada riset ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasi dan selanjutnya analisis regresi linier berganda pada taraf signifikansi  $< 0,05$ .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi Product moment Pearson, yaitu membandingkan koefisien korelasi total item  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel. Jika nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, maka suatu instrumen dapat dinyatakan valid.

Tabel 1  
Uji Validitas

Variabel	Hitung-R	Tabel-R	Keterangan
X1.1	0,785	0,2353	Valid
X1.2	0,743	0,2353	Valid
X1.3	0,832	0,2353	Valid
X1.4	0,817	0,2353	Valid
X1.5	0,850	0,2353	Valid
X2.1	0,677	0,2353	Valid
X2.2	0,851	0,2353	Valid
X2.3	0,734	0,2353	Valid
X2.4	0,847	0,2353	Valid
X2.5	0,736	0,2353	Valid
Y1.1	0,816	0,2353	Valid
Y1.2	0,871	0,2353	Valid
Y1.3	0,893	0,2353	Valid

Y1.4	0,882	0,2353	Valid
Y1.5	0,735	0,2353	Valid

Sumber : Output SPSS 25.

Berdasarkan hasil uji validitas, hasil r tabel pada pernyataan 1 hingga 15 menunjukkan nilai antara 0,677 sampai dengan 0,893 dan nilai r tabel sebesar 0,2353. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dan variable dependen valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, dalam hal ini kuesioner. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila koefisiennya diatas 0,6 (Ghozali, 2018).

Tabel 2  
Uji Reliabilitas

Variabel	Alfa Cronbach	Keandalan	Keterangan
X1	0,880	0,600	Reliable
X2	0,737	0,600	Reliable
Y	0,778	0,600	Reliable

Sumber : Output SPSS 25.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha jika item dihapus untuk semua item pertanyaan berkisar antara 0,737 hingga 0,880 dan Cronbach's Alpha adalah 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa semua item reliabel karena melebihi nilai Alpha Cronbach.

### Uji Normalitas

Uji normalitas memverifikasi apakah variabel pengganggu atau variabel sisa model regresi berdistribusi normal. Uji Kolmogorov Smirnov dilakukan terhadap nilai sisa. Jika uji Kolmogorov Smirnov memberikan nilai signifikansi  $> 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), maka residu model regresi berdistribusi normal. Berikut hasil uji residu Kolmogorov Smirnov:



Tabel 3  
Nilai uji normalitas

TIDAK	Uji Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel	Sig
1	Asimp. Sig. (2-ekor)	0,311c,d

Sumber: Output SPSS 25.

.Berdasarkan tabel 3 menjelaskan bahwa nilai Asymp. Sig dengan nilai signifikansi 0,311 dan nilai diatas taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi pencegahan penipuan berdistribusi normal.

### Uji Multikolonaritas

Uji multikolonaritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari asumsi klasik multikolonaritas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam suatu model regresi.

Tabel 4  
Nilai uji multikoleonaritas

Statistik Kolinearitas	
Toleransi	VIF
0,226	1.428
0,392	1.317

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4 di atas, nilai toleransi lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Sedangkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama dengan nilai VIF yaitu. maksimal 10. Dengan demikian disimpulkan bahwa model regresi ini tidak menunjukkan gejala multikolonaritas antar variabel independen.

### Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat ketimpangan varians sisa pengamatan dalam model regresi. Oleh karena itu, diperlukan uji statistik yang dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan adalah uji Glejser, dimana nilai absolut dari nilai residu diregresi dengan variabel bebasnya. Nilai sig dibandingkan dengan 0,05. Hasil statistik disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5  
Nilai Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Kualitas Laporan Keuangan(X1)	0,631

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan Tabel 5, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang mempunyai signifikansi statistik mempengaruhi variabel dependen atau nilai absolut dari nilai residu. Hal ini ditunjukkan dengan probabilitas signifikansi lebih besar dari 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

### Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan menggunakan nilai customized R-squared.

Tabel 7

### Nilai Koefisien Determinasi (R-Square)

Variabel	R persegi	R Square yang disesuaikan
Kualitas Laporan Keuangan(Y)	0,790a	0,775

Sumber : Output SPSS 25.

Hasil perhitungan regresi pada tabel 7 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi (R square) yang diperoleh sebesar 0,790. Artinya 79,0% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah (X1) dan sistem pengendalian internal (X2), sedangkan sisanya sebesar 21,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Signifikansi Parameter Parsial (T-Test)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial menjelaskan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) untuk system akuntansi keuangan daerah (X1), sistem pengendalian internal pemerintah (X2) dan kualitas laporan keuangan (Y). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen (hipotesisditerima).

Tabel 6 Nilai Uji-T

Variabel	Koefisien		T	Sig.
	B	St. Kesalahan		
(Konstan)	2.136	1.548	1.541	0,151

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,253	0,361	2.346	0,021
Pengendalian Internal	0,189	0,385	2.571	0,013

Sumber : Output SPSS 23.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diperoleh hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut.

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,021 ( $<0,05$ ) dan nilai beta pada Unstandardized Coefficients bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan dan hipotesis pertama terdukung.

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,013 ( $<0,05$ ) dan nilai beta pada Unstandardized Coefficients bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan dan hipotesis pertama terdukung.

### **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan, variabel penerapan sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai sistem informasi akuntansi untuk mengolah data transaksi di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, antara lain SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dan SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan). Sistem informasi ini dibuat dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya pengembangan

administrasi elektronik (E-Government) serta untuk memudahkan dan mempercepat proses administrasi publik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kualitas informasi menunjukkan seberapa baik permintaan akan informasi terpenuhi. (Pareek, 2006) Informasi akuntansi yang berkualitas adalah informasi akuntansi yang mempunyai karakteristik yang menjadikan informasi tersebut lebih bermanfaat. (O'Brien dan Marakas, 2011) Penerapan SIA meningkatkan dan menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi.

Dzulfikar Ahli Fikri (2019) dan Yusrawati (2015), (Surya Adhitama, 2017) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartopawiro dan Susanto (2018) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan perekonomian provinsi, dan tindakan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan perekonomian provinsi. Artinya, tindakan pengendalian intern dapat mempengaruhi laporan keuangan pemerintah provinsi untuk memperbaikinya, dapat dilihat sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara maksimal di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan karena sistem pengendalian intern organisasi merupakan hal yang paling penting dan sangat diperlukan karena dalam kegiatan operasional memerlukan kebijakan khusus yang dapat membatasi dan mengkoordinasikan setiap kegiatan, sehingga tindakan pengendalian yang dilakukan selama ini dapat lebih ditingkatkan.

Penelitian ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Indrayani & Widyaastuti (2020) dan Triono & Dewi (2020), sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Desipradani & Nuraini (2018), Katharina et al (2019) ditemukan

tidak adanya pengaruh hubungan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

#### **D. SIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang bisa dimaksimalkan dari adanya pengimplementasian system informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal pemerintah pada setiap masing-masing lini unit kerja. ketika sumber daya manusia yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan memiliki kompetensi yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan system sangat bergantung pada manusia-manusia yang menjalankan system tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhitama, Surya. 2017. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir)". *Jurnal Akuntansi* , 5(2).
- Ansir Launtu, (2021). *Jurnal Akuntansi Volume 18 No 1, April 2021, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.*
- Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten*

- Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I* Vol. 24 No. 1.
- Desipradani, G & Nuraini, F. (2018). Variabel Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. *Majalah Ekonomi*. XXIII, 2.
- Fikri, D. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*.
- Indrayani & Widiastuti (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1-16.
- Kartopawiro, S & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. 16(1), 1-14.
- Katharina, M. G. G., Mulyadi, J., & Syam, M. A. (2019). Katharina Maria Goreti Goo , JMV . Mulyadi , M . Ardiansyah Syam Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. *Ekobisman*, 4(2), 94–109.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). Developing business/IT solutions. *Management Information Systems*, 488489, 74–89.
- Pareek, D. (2006). *Business Intelligence for telecommunications*. Auerbach Publications.
- Suhardjo, Y. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Solusi* Vol. 17, No. 4 , 1-22.

Triyono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 213-220.

UU 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)